



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN
YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pembagian serta penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) pada setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220.);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 Nomor 03)
11. Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Waropen Nomor 116 Tahun 2002 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2002 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen;
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
8. BKPD adalah Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
9. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dibantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.

13. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat (Bamuskam) adalah lembaga perwakilan Kampung dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
14. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Bamuskam dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
16. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK;
19. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBK.

BAB II

RUANG LINGKUP ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah bagian dari pendapatan Kampung yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (3) Alokasi Dana Kampung (ADK) dialokasikan kepada Kampung dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Kampung dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan kampung.
- (4) Alokasi Dana Kampung merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

BAB III

PENETAPAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG, TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Alokasi dana Alokasi Dana Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Kepulauan Yapen ditetapkan sebesar Rp. 62,773,481,300,- (Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (2) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 160 (Seratus Enam Puluh) Pemerintah Kampung Se-Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Musyarawah Kampung (Bamuskam), serta Insentif bagi RT/RW dan Hansip/Linmas;
 - b. Jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan besaran nilai Alokasi Dana Kampung setiap Kampung.
- (4) Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Perhitungan dan penetapan besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat 3 adalah sebagai berikut :

Besaran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 menggunakan Asas Merata sebesar 90 % (Sembilan Puluh Persen) dibagi secara merata untuk 160 (seratus enam puluh) kampung dan Asas Proporsional sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan rumusan pembagian ADK memakai 4 (empat) variabel berdasarkan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis Kampung.

1. Besaran Alokasi Dana Kampung dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADK_x = ADKM_x + ADKP_x$$

ADK_x = Alokasi Dana Kampung untuk Kampung x
 ADKM_x = Alokasi Dana Kampung Minimal yang diterima Kampung
 ADKP_x = Alokasi Dana Kampung Proporsional untuk Kampung x

2. Besarnya Alokasi Dana Kampung Minimal untuk setiap Kampung dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADKM_x = \frac{\sum ADKM}{\text{Jumlah Kampung Se- Kabupaten}}$$

ADKM_x = Alokasi Dana Kampung Minimal x
 $\sum ADKM$ = Jumlah ADKM Kabupaten
 Jumlah Kampung se Kabupaten = Jumlah Kampung dalam Kabupaten

3. Besaran Alokasi Dana Kampung Proporsional untuk setiap Kampung dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADKP_x = \frac{BD_x}{\sum BD_x} \times (ADK - \sum ADKM)$$

ADKP_x = Alokasi Dana Kampung Proporsional
 BD_x = Nilai Bobot Kampung
 ADK = Jumlah Alokasi Dana Kampung Kabupaten
 $\sum ADKM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Kampung Minimal
 $\sum BD$ = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Kampung

4. Penentuan Nilai Bobot Kampung di hitung dengan rumus, yaitu :

$$BD_x = a_1.KV_x + a_2.KV_2x + a_3.KV_3x + \dots + a_n.KV_nx$$

BD_x = Nilai Bobot Kampung x
 a₁, a₂, ..., a_n = Angka Bobot masing-masing Variabel
 KV = Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

Pasal 5

- (1) Nilai Alokasi Dana Kampung setiap Kampung menjadi salah satu pendapatan Kampung yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen APBK.
- (2) Alokasi Dana Kampung oleh Pemerintah Kampung dapat digunakan setelah ditetapkan didalam Dokumen APBK.
- (3) Dokumen APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah salah satu sumber pendapatan Kampung dalam APBK. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrenbang Kampung yang prosesnya sebagai berikut :

a. Pra Musyawarah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen lewat Bappeda memberikan petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan Kampung kepada Kepala Distrik dan Tim pendamping Tingkat Distrik, Kepala Kampung dan tim Pendamping Lokal Kampung, ketua Bamuskam serta ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung.

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kampung

Berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbang Kampung), Kepala Kampung bersama-sama dengan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK), Bamuskam, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung (seperti PKK, RT/RW, Karangtaruna, dll) dengan difasilitasi Kepala Distrik melakukan musrenbang guna membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat Kampung termasuk rencana penggunaan ADK dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menitik beratkan pada Program Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat. Penetapan rencana kegiatan pembangunan yang didanai ADK didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat Kampung. Hasil pembahasannya merupakan bahan masukan untuk perencanaan dan penyusunan APBK. Hasil musyawarah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Program-program yang dibiayai dalam APBK tahun bersangkutan.
- 2) Program-program yang tidak dibiayai dalam APBK tahun bersangkutan dan menjadi usulan ke tingkat kabupaten melalui musrenbang tingkat Distrik.

Pasal 7

- (1) Penyediaan dana untuk ADK beserta fasilitasnya dianggarkan pada BKPD Kabupaten Kepulauan Yapen setiap tahunnya.
- (2) Penyaluran dana ADK dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Kampung secara bertahap yakni pertriwulan sesuai peraturan yang mengatur dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

- (3) Penyaluran ADK untuk Triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kampung penerima menyampaikan :
 - a. Peraturan Kampung tentang RKPK Tahun Anggaran 2020;
 - b. Peraturan Kampung tentang APBK Tahun Anggaran 2020;
- (4) Penyaluran ADK untuk Triwulan II, III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kampung penerima menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan ADK Triwulan sebelumnya
- (5) Berkas kelengkapan administrasi tersebut pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada Bupati Kepulauan Yapen untuk kemudian dibuatkan nota rekomendasi pemindahbukuan dari RKUD ke RKK
- (6) Rekening Kas Kampung dibuka di Bank Umum Pemerintah yang telah ditetapkan atau Bank Umum lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) baik itu Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA yang disesuaikan dengan rencana kegiatan dalam APBK. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Kampung dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pagu ADK (Alokasi Dana Kampung) adalah bantuan keuangan yang merupakan bagian dari Pendapatan Kampung didalam APBK dengan ketentuan Belanja Kampung disesuaikan dengan prioritas penggunaan ADK yang mencakup 4 Bidang yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Masyarakat;
 - b) Mekanisme Pencairan ADK untuk Penghasilan Tetap (Siltap), Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Bamuskam serta Insentif bagi RT/RW atau Linmas sebelumnya melengkapi persyaratan administrasi berupa surat pertanggungjawaban Penyaluran Keuangan yang dilampirkan dengan daftar penerima keuangan (Siltap, Tunjangan dan Insentif) setiap triwulan tahun anggaran berjalan.
 - c) Mekanisme pencairan ADK untuk kegiatan selain Penghasilan Tetap (Siltap), Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Bamuskam serta Insentif bagi RT/RW atau Linmas sebelumnya melengkapi persyaratan administrasi berupa bukti belanja yakni kwitansi pengeluaran, faktur, nota penjualan, Berita Acara Serah Terima Uang Berita Acara Serah Terima Barang, SPK (Surat Perintah Kerja) untuk pekerjaan fisik dan pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan objek belanja kampung setiap triwulan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Kampung untuk :
 1. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat Kampung;

2. Tunjangan Kepala Kampung dan Tunjangan Perangkat Kampung ;
3. Tunjangan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam)
4. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan LINMAS;
5. Biaya Operasional Pemerintahan Kampung dan Bamuskam meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas
 - b. Belanja barang dan penggandaan ATK
 - c. Belanja makan/minum Rapat
 - d. Biaya perawatan balai / kantor dan lingkungan Balai /Kantor Kepala Kampung
 - e. Belanja pakaian dinas upacara kepala Kampung dan kelengkapannya.
 - f. Belanja pakaian dinas harian
 - g. Biaya perawatan kendaraan dinas.
 - h. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban meliputi penyusunan APBK, LPPK (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kampung) dan LKPJ, pelaporan dan Pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung.
 - i. Biaya belanja jasa listrik, air, telepon.
 - j. Biaya operasional Pemerintahan Kampung dan Bamuskam diatur sebagai berikut : **85% (delapan puluh lima perseratus) untuk operasional Pemerintahan Kampung dan 15% (Lima belas perseratus) untuk operasional Bamuskam.**
6. Penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung meliputi :
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala Kampung.
 - b. Peningkatan kemampuan usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKamp).
 - c. Penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna.
 - d. Pengembangan sosial budaya.
 - e. Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dapat dipergunakan untuk mendukung Kegiatan Posyandu dan penanggulangan gizi buruk dan lain-lain.
 - f. Biaya pembuatan dan perbaikan profil Kampung
 - g. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, meliputi : pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis dan studi banding.
 - h. Kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kampung.
 - i. Lain-lain yang sifatnya darurat sesuai dengan kondisi Kampung.

Pasal 10

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) diatur dan ditetapkan besarnya dengan Peraturan Bupati

- (2) Tunjangan untuk Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Tunjangan dan Insentif Lainnya yang sifatnya rutin dengan maksud untuk peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) dapat dianggarkan dalam APBK jika prioritas penggunaan ADK di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan telah terpenuhi selanjutnya diatur dan ditetapkan besarnya dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pengalokasian Belanja Pengadaan Aset tetap baik yang bergerak dan tidak bergerak khususnya pengadaan tanah dan kendaraan operasional sebelumnya harus melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset kampung untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati;
- (4) Pengalokasian untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Studi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) yang dilaksanakan diluar Daerah harus mendapat izin dan persetujuan dari Bupati;

Pasal 11

- (1) Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan ADK dapat mempergunakan sistem informasi/ dan atau aplikasi SISKEUDES yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK).
- (3) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Semester, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kampung di kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 yang dibuat secara Rutin setiap 6 (enam) bulan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja.
 - b. Laporan Akhir dari penggunaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Kampung.
- (4) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala Urusan Keuangan dan diketahui Kepala Kampung disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik untuk diteruskan kepada DPMK dengan ketentuan Laporan Semester I paling lambat Bulan Juli 2020, Laporan Semester II paling lambat Bulan Februari 2021, dan Laporan akhir Penggunaan Alokasi Dana Kampung paling lambat Bulan Maret 2021.
- (5) Apabila Kepala Kampung tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka Bupati memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran ADK secara langsung pada Kampung yang bersangkutan sampai diselesaikan dan diserahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADK yang meliputi :
- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan ADK;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) sebagaimana dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADK. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADK adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADK dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Dalam organisasi Pemerintah Kampung secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Kampung melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan ADK yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 3. Diluar organisasi Pemerintah Kampung, pengawasan dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung.
 - b. Aparat pengawasan yaitu APIP dalam hal ini Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Kepala Distrik berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung.

Pasal 13

- (1) Pelayanan informasi mengenai Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai berikut :
1. Mengenai program dan kegiatan serta pembinaan administrasi, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Kepulauan Yapen;
 2. Mengenai monitoring laporan hasil kinerja pembangunan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Yapen;
 3. Mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Kepulauan Yapen.
 4. Pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan, oleh Kepala Distrik setempat.
 5. Pemeriksaan hasil pembangunan dan keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pasal 14

Pencairan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ke rekening Kas Kampung pada masing-masing Pemerintah Kampung dilakukan apabila Peraturan Kampung tentang RPKK , APBK dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBK telah disahkan;

- (1) Apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADK tersebut tidak dapat dicairkan sehingga tercatat sebagai Silpa (Selisih Penerimaan Anggaran) di Tahun berikutnya;
- (2) Kepala Kampung tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADK;
- (3) Kaur Keuangan wajib memungut pajak-pajak Negara sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara;
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menyimpan uang sisa kas pembukuan lebih dari Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- (5) Pembiayaan pembangunan/fisik Kampung dilampiri dengan data pendukung foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %, khusus pembangunan fisik senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih disamping data dukung foto agar dilampiri RAB dan Gambar;
- (6) ADK tidak diperbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain;
- (7) Anggaran ADK terintegrasi dalam APBK dan Pelanggaran ataupun temuan atas Penyalahgunaan ADK akan di proses lebih lanjut oleh pihak yang berwajib sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 15 Januari 2020


BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR


Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
CAP/TTD
ALEXANDER NUSSY

Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
4. Para Kepala Kampung Se- Kabupaten Kepulauan Yapen masing-masing di Serui ;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA

SONNY NH, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781211 200605 1 001



Lampiran I Peraturan Bupati Kepulauan Yapen

Nomor : 04 TAHUN 2020
 Tanggal : 15 Januari 2020
 Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
 Kampung (ADK) Pada Kampung di Kabupaten Kepulauan
 Yapen Tahun Anggaran 2020

DAFTAR PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	DISTRIK	KAMPUNG	ADDMx	ADDPx	PAGU DANA
1	2	3	4	5	6=(4+15)
1	Yapen Selatan	1 Serui Laut	353,101,000	39,986,000	393,087,000
		2 Banawa	353,101,000	81,381,000	434,482,000
		3 Turu	353,101,000	50,724,000	403,825,000
		4 Pasir Hitam	353,101,000	58,515,000	411,616,000
		5 Pasir Putih	353,101,000	53,521,000	406,622,000
		6 Manaini	353,101,000	44,751,000	397,852,000
		7 Imandoa	353,101,000	33,425,000	386,526,000
		8 Barawaikap	353,101,000	58,975,000	412,076,000
		9 Bawai	353,101,000	41,904,000	395,005,000
		10 Nundawipi	353,101,000	27,097,000	380,198,000
2	Yapen Barat	11 Webi	353,101,000	73,981,000	427,082,000
		12 Papuama	353,101,000	110,839,000	463,940,000
		13 Kairawi	353,101,000	57,505,000	410,606,000
		14 Natabui	353,101,000	68,754,000	421,855,000
		15 Warabori	353,101,000	42,223,000	395,324,000
		16 Wimoni	353,101,000	110,305,000	463,406,000
		17 Sasawa	353,101,000	24,387,000	377,488,000
		18 Inowa	353,101,000	49,892,000	402,993,000
		19 Maniri	353,101,000	68,329,000	421,430,000
		20 Nuiwiora	353,101,000	39,472,000	392,573,000
		21 Yenusi Marau	353,101,000	43,555,000	396,656,000
		22 Marau	353,101,000	47,431,000	400,532,000
		23 Toweta	353,101,000	35,900,000	389,001,000
		24 Woiwani	353,101,000	63,979,000	417,080,000
		25 Yarori	353,101,000	43,926,000	397,027,000
		26 Narei	353,101,000	33,684,000	386,785,000
3	Yapen Timur	27 Korombobi	353,101,000	33,778,000	386,879,000
		28 Dawai	353,101,000	43,998,000	397,099,000
		29 Wabo	353,101,000	27,645,000	380,746,000
		30 Nunsembai	353,101,000	28,141,000	381,242,000

NO.	DISTRIK	KAMPUNG		ADDMx	ADDPx	PAGU DANA
1	2	3		4	5	6=(4+5)
		31	Nunsiari	353,101,000	67,163,000	420,264,000
		32	Woinsupi	353,101,000	32,116,000	385,217,000
		33	Awunawai	353,101,000	89,876,000	442,977,000
		34	Mareruni	353,101,000	17,805,000	370,906,000
		35	Wabompi	353,101,000	16,987,000	370,088,000
		36	Duai	353,101,000	29,420,000	382,521,000
		37	Sere Sere	353,101,000	35,347,000	388,448,000
4	Angkaisera	38	Menawi	353,101,000	87,307,000	440,408,000
		39	Wadapi	353,101,000	43,040,000	396,141,000
		40	Kainui I	353,101,000	46,064,000	399,165,000
		41	Aitiri	353,101,000	53,617,000	406,718,000
		42	Wawuti	353,101,000	32,789,000	385,890,000
		43	Roipi	353,101,000	54,260,000	407,361,000
		44	Ransarnoni	353,101,000	51,546,000	404,647,000
		45	Kainui II	353,101,000	52,999,000	406,100,000
		46	Wanampompi	353,101,000	25,195,000	378,296,000
		47	Mananayam	353,101,000	23,798,000	376,899,000
		48	Roipi Dua	353,101,000	31,556,000	384,657,000
5	Poom	49	Poom I	353,101,000	56,045,000	409,146,000
		50	Serewen	353,101,000	37,461,000	390,562,000
		51	Poom II	353,101,000	96,729,000	449,830,000
		52	Mokiroan	353,101,000	24,771,000	377,872,000
		53	Rarisi	353,101,000	40,265,000	393,366,000
		54	Warioi	353,101,000	24,997,000	378,098,000
		55	Humbe Awai	353,101,000	28,396,000	381,497,000
		56	Nurawi	353,101,000	26,039,000	379,140,000
6	Kosiwo	57	Kamanap	353,101,000	29,635,000	382,735,000
		58	Aromarea	353,101,000	31,313,000	384,414,000
		59	Maria Rotu	353,101,000	27,453,000	380,554,000
		60	Kanawa	353,101,000	24,436,000	377,537,000
		61	Tatui	353,101,000	45,025,000	398,126,000
		62	Ariepi	353,101,000	21,597,000	374,698,000
		63	Sarawandori	353,101,000	18,849,000	371,950,000
		64	Ambaidiru	353,101,000	39,811,000	392,912,000
		65	Mambo	353,101,000	22,938,000	376,039,000
		66	Manainin	353,101,000	22,599,000	375,700,000
		67	Numaman	353,101,000	29,519,000	382,620,000
		68	Ramangkurani	353,101,000	40,095,000	393,196,000
		69	Sarawandori Dua	353,101,000	26,721,000	379,822,000
		70	Ariepi Dua	353,101,000	28,794,000	381,895,000

NO.	DISTRIK	KAMPUNG		ADDMx	ADDPx	PAGU DANA
1	2	3		4	5	6=(4+15)
		71	Panduami	353,101,000	27,086,000	380,187,000
7	Yapen Utara	72	Tindaret	353,101,000	43,738,000	396,839,000
		73	Yobi	353,101,000	40,795,000	393,896,000
		74	Sambrawai	353,101,000	41,256,000	394,357,000
		75	Kiriyau	353,101,000	42,164,000	395,265,000
		76	Soromasen	353,101,000	30,888,000	383,989,000
		77	Roswari	353,101,000	39,952,000	393,053,000
		78	Doreimanona	353,101,000	31,450,000	384,551,000
8	Raimbawi	79	Waindu	353,101,000	38,233,000	391,334,000
		80	Barawai	353,101,000	30,757,000	383,858,000
		81	Woda	353,101,000	31,686,000	384,787,000
		82	Kororompui	353,101,000	35,836,000	388,937,000
		83	Aisau	353,101,000	21,444,000	374,545,000
		84	Sewenui	353,101,000	34,597,000	387,698,000
		85	Sawendui	353,101,000	24,362,000	377,463,000
9	Teluk Ampimoi	86	Randawaya	353,101,000	45,708,000	398,809,000
		87	Warironi	353,101,000	59,974,000	413,075,000
		88	Ampimoi	353,101,000	62,055,000	415,156,000
		89	Waita	353,101,000	50,539,000	403,640,000
		90	Ayari	353,101,000	53,069,000	406,170,000
		91	Koroapi	353,101,000	34,224,000	387,325,000
		92	Wabuayar	353,101,000	28,046,000	381,147,000
		93	Tarei	353,101,000	30,296,000	383,397,000
		94	Bareraipi	353,101,000	22,990,000	376,091,000
		95	Arareni	353,101,000	26,135,000	379,236,000
		96	Siromi	353,101,000	36,051,000	389,152,000
10	Kepulauan Ambai	97	Ambai I	353,101,000	43,618,000	396,719,000
		98	Saweru	353,101,000	36,395,000	389,496,000
		99	Kawipi	353,101,000	36,354,000	389,455,000
		100	Wamori	353,101,000	40,629,000	393,730,000
		101	Adiwipi	353,101,000	33,415,000	386,516,000
		102	Umani	353,101,000	42,287,000	395,388,000
		103	Ambai II	353,101,000	32,968,000	386,069,000
		104	Mambawi	353,101,000	26,920,000	380,021,000
		105	Baisore	353,101,000	30,675,000	383,776,000
		106	Rondepi	353,101,000	42,316,000	395,417,000
		107	Dorau	353,101,000	30,922,000	384,023,000
		108	Perea	353,101,000	26,329,000	379,430,000
		109	Imboriawa	353,101,000	29,485,000	382,586,000
		110	Bairei	353,101,000	24,830,000	377,931,000

NO.	DISTRIK	KAMPUNG	ADDMx	ADDPx	PAGU DANA
1	2	3	4	5	6=(4+5)
		111 Aiwarangani	353,101,000	33,499,000	386,600,000
		112 Toroa	353,101,000	30,638,000	383,739,000
		113 Nuniandei	353,101,000	28,121,000	381,222,000
		114 Marawi	353,101,000	27,261,000	380,362,000
11	Wonawa	115 Wooi	353,101,000	41,372,000	394,473,000
		116 Woinap	353,101,000	43,604,000	396,705,000
		117 Aibondeni	353,101,000	30,713,000	383,814,000
		118 Kanaki	353,101,000	39,354,000	392,455,000
		119 Dumani	353,101,000	47,812,000	400,913,000
		120 Karemoni	353,101,000	52,635,000	405,736,000
		121 Haihorei	353,101,000	55,710,000	408,811,000
		122 Rembai	353,101,000	46,102,000	399,203,000
		123 Jaimaria	353,101,000	26,858,000	379,959,000
		124 Awado	353,101,000	29,513,000	382,614,000
12	Windesi	125 Kaonda	353,101,000	25,536,000	378,637,000
		126 Windesi	353,101,000	35,451,000	388,552,000
		127 Munggui	353,101,000	35,307,000	388,408,000
		128 Karawi	353,101,000	45,369,000	398,470,000
		129 Asai	353,101,000	33,558,000	386,659,000
		130 Rosbori	353,101,000	25,575,000	378,676,000
		131 Waisani	353,101,000	50,918,000	404,019,000
		132 Saruman	353,101,000	32,501,000	385,602,000
		133 Aryobu	353,101,000	25,183,000	378,284,000
13	Pulau Kurudu	134 Kaipuri	353,101,000	29,521,000	382,622,000
		135 Doreiamini	353,101,000	27,032,000	380,133,000
		136 Andesaria	353,101,000	32,199,000	385,300,000
		137 Kurudu	353,101,000	23,429,000	376,530,000
		138 Kirimbri	353,101,000	27,619,000	380,720,000
		139 Manusundu	353,101,000	32,012,000	385,113,000
		140 Mnukwar	353,101,000	19,593,000	372,694,000
		141 Mansesi	353,101,000	20,401,000	373,502,000
14	Pulau Yerui	142 Miosnum	353,101,000	24,400,000	377,501,000
		143 Jeniari	353,101,000	22,483,000	375,584,000
		144 Kumpeki	353,101,000	18,365,000	371,466,000
		145 Ausem	353,101,000	19,205,000	372,306,000
		146 Yeituarau	353,101,000	22,623,000	375,724,000
15	Anotaurei	147 Ketuapi	353,101,000	29,614,000	382,715,000
		148 Mariadei	353,101,000	53,983,000	407,084,000
		149 Yapan	353,101,000	59,299,000	412,400,000
		150 Mantembu	353,101,000	35,213,000	388,314,000

NO.	DISTRIK	KAMPUNG	ADDMx	ADDPx	PAGU DANA
1	2	3	4	5	6=(4+5)
		151 Famboaman	353,101,000	65,233,000	418,334,000
		152 Kandowarira	353,101,000	28,883,000	381,984,000
		153 Warari	353,101,000	77,339,000	430,440,000
16	Yawakukat	154 Kontinuai	353,101,000	42,486,000	395,587,000
		155 Woniwon	353,101,000	31,209,000	384,310,000
		156 Sanayoka	353,074,170	29,784,130	382,858,300
		157 Rambai	353,101,000	37,791,000	390,892,000
		158 Yapanani	353,101,000	30,022,000	383,123,000
		159 Borai	353,101,000	39,327,000	392,428,000
		160 Kabuena	353,101,000	42,843,000	395,945,000
JUMLAH			56,496,133,170	6,277,348,130	62,773,481,300

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

CAP/TTD

TONNY TESAR

